

# ANOMALI AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA: ANALISIS POLA KETERKAITAN KERUGIAN DAERAH, OPINI AUDIT BPK, PDRB PER KAPITA, DAN GINI RATIO DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI DI INDONESIA

**Norma Emilia<sup>1</sup>, Sarwani<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, 70123

Telp: +6285249998869

E-mail: [norma.emilia2392@gmail.com](mailto:norma.emilia2392@gmail.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-04-30

Revised : 2026-06-25

Accepted : 2026-06-25

## KEYWORDS

Regional Financial  
Accountability  
Human Development,  
Audit Opinion,  
Regional Losses,  
GRDP Per Capita,  
Income Inequality

## KATA KUNCI

Akuntabilitas Keuangan Daerah,  
Pembangunan Manusia,  
Opini Audit,  
Kerugian Daerah,  
PDRB Per Kapita,  
Ketimpangan

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the anomaly in the relationship between regional financial accountability and human development across provinces in Indonesia during the pre-COVID-19 period. The research employs a qualitative descriptive approach using document analysis based on secondary data from the Audit Board of Indonesia (BPK) through the Summary of Audit Reports (IHPS) and publications from Statistics Indonesia (BPS), including regional losses, audit opinions, gross regional domestic product (GRDP) per capita, Gini ratio, and the Human Development Index (HDI). The findings reveal that the dominance of unqualified audit opinions (WTP) is not accompanied by uniformity in HDI achievements across provinces. In addition, regional losses do not exhibit a consistent pattern in relation to human development levels, while GRDP per capita tends to show a more aligned relationship with HDI compared to other indicators. These findings indicate a disconnect between administrative accountability and actual welfare outcomes. This study highlights that the success of regional financial management cannot be solely measured by audit opinions, but must also consider its effectiveness in improving the quality of life of the population.*

## ABSTRAK

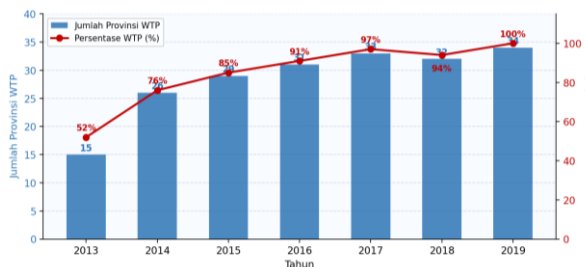
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali dalam keterkaitan antara akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan manusia di provinsi Indonesia periode pra-pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen dengan memanfaatkan data sekunder dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan dan publikasi Badan Pusat Statistik yang mencakup kerugian daerah, opini audit, PDRB per kapita, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak diikuti oleh keseragaman capaian IPM antarprovinsi. Selain itu, kerugian daerah tidak memperlihatkan pola keterkaitan yang konsisten dengan tingkat pembangunan manusia, sementara PDRB per kapita cenderung lebih sejalan dengan capaian IPM dibandingkan indikator lainnya. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara akuntabilitas administratif dan outcome kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa

keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat hanya diukur melalui opini audit, tetapi perlu dilihat dari efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 2019, seluruh 34 provinsi di Indonesia untuk pertama kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini selama bertahun-tahun menjadi *target* utama reformasi keuangan daerah. Namun, di tahun yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta tercatat 80,76, sedangkan IPM Papua hanya 60,84. Selisih 20 poin tersebut mencerminkan jurang kesejahteraan yang masih sangat dalam antarprovinsi. Apabila opini WTP benar-benar merepresentasikan kualitas tata kelola yang mendukung kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sebesar ini seharusnya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Inilah anomali yang menjadi titik berangkat penelitian ini, yaitu perbaikan akuntabilitas formal keuangan daerah yang tidak disertai konvergensi kesejahteraan yang sepadan.

Tren peningkatan opini WTP pada pemerintah provinsi di Indonesia berlangsung secara konsisten selama satu dekade, dari 52% atau 15 provinsi pada tahun 2013 hingga mencapai 100% atau seluruh 34 provinsi pada tahun 2019 (IHPS BPK, 2014–2020), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 berikut.



Sumber: IHPS BPK RI 2014–2020 (data diolah)

**Gambar 1.** Tren Persentase Opini WTP pemerintah Provinsi di Indonesia

Namun, pencapaian formal tersebut berbanding terbalik dengan realitas ketidakpatuhan anggaran. IHPS BPK (2019) mencatat lebih dari 2.600 temuan kerugian daerah senilai lebih dari Rp1 triliun pada tahun 2018, serta lebih dari 2.100 temuan senilai sekitar Rp800 miliar pada tahun 2019. Dua tren yang seharusnya bergerak searah justru menunjukkan arah yang berlawanan. Kontras antarprovinsi semakin mempertegas anomali tersebut. DKI Jakarta dengan PDRB per kapita Rp269 juta berpredikat WTP, memiliki temuan kerugian yang relatif minimal, dan IPM sebesar 80,76. Sementara itu, Papua yang juga

berpredikat WTP pada tahun yang sama mencatat nilai kerugian daerah yang signifikan dan IPM hanya 60,84. Furqan dkk. (2020) menegaskan bahwa kondisi seperti ini mengindikasikan ketidaksielarasan antara kualitas pelaporan formal dan implementasi tata kelola anggaran secara substantif. *Disconnect* tersebut tidak dapat terdeteksi hanya dari angka opini audit.

Penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara akuntabilitas keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Pamungkas dkk. (2019) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit, sedangkan variabel pendapatan daerah dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh berarti. Furqan dkk. (2020) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berperan positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan layanan publik, sementara temuan audit justru berdampak negatif. Nor dkk. (2018) menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan dengan opini audit pemerintah daerah, meskipun arah pengaruhnya tidak konsisten antarwilayah. Lebih dari sekadar inkonsistensi temuan, pendekatan kuantitatif menghadapi hambatan metodologis serius pada periode 2018–2019 karena variabel opini audit hampir tidak bervariasi, sehingga kekuatan diskriminatifnya sebagai prediktor statistik menjadi sangat terbatas. Hingga kini belum ada kajian yang secara naratif dan komparatif menelusuri *disconnect* antara akuntabilitas administratif dan *outcome* kesejahteraan secara menyeluruh lintas seluruh provinsi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan anomali keterkaitan antara kerugian daerah, opini audit BPK, PDRB per kapita, dan *Gini Ratio* dengan capaian IPM di 34 provinsi Indonesia pada periode 2018–2019. Periode tersebut dipilih sebagai *baseline* pra-Pandemi COVID-19 untuk menghindari distorsi struktural yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan global sejak 2020 (BPS, 2020). Kontribusi utama penelitian ini adalah membedakan secara analitis antara akuntabilitas administratif, yakni kepatuhan teknis pelaporan keuangan, dan *outcome* kesejahteraan, yakni capaian IPM riil yang dirasakan masyarakat. Distingsi ini belum pernah muncul

dalam literatur sebelumnya, tetapi sangat krusial bagi desain kebijakan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang lebih substantif.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1 Teori Keagenan dalam Konteks

#### Pemerintahan Daerah

Kerangka teoritis penelitian ini berpijak pada *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), yang dalam konteks pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagai *agen* yang mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat selaku *prinsipal*. Konflik keagenan timbul ketika pemerintah (*agen*) memiliki kepentingan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan masyarakat, yang dapat mendorong terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi sehingga menimbulkan kerugian daerah. Dalam perspektif ini, opini audit BPK berfungsi sebagai mekanisme pemantauan eksternal yang mengurangi asimetri informasi antara *agen* dan *prinsipal*. Pamungkas, Avrian, dan Ibtida (2019) menegaskan bahwa meski opini WTP meningkat, jumlah temuan ketidakpatuhan juga bertambah, sehingga memperkuat relevansi *agency theory* dalam konteks akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan formal tidak selalu mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang substantif.

Furqan *et al.* (2020) menambahkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berperan positif terhadap kualitas laporan keuangan dan layanan publik, sementara temuan audit justru berdampak negatif. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan eksternal dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara *agen* dan *prinsipal*.

Setyaningrum, Wardhani, dan Martani (2019) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh signifikan terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa akuntabilitas administratif harus diikuti dengan implementasi substantif agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Wardhani, Martani, dan Setyaningrum (2020) juga menekankan bahwa kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit. Dengan demikian, literatur mutakhir memperkuat kerangka *agency theory* dengan bukti empiris dari konteks Indonesia.

Treisman (2000) menegaskan bahwa kualitas tata kelola keuangan daerah dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, taraf ekonomi, dan budaya

politik masyarakat yang secara keseluruhan tercermin dalam IPM. Ini berarti hubungan antara akuntabilitas keuangan dan kesejahteraan bukan bersifat satu arah, melainkan saling memengaruhi secara dinamis. Pemerintah yang lebih akuntabel seharusnya menghasilkan alokasi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan manusia (Rajkumar & Swaroop, 2004).

### 2.2 Kerugian Daerah dan Kecenderungannya terhadap Pembangunan Manusia

Kerugian daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang terjadi akibat pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK mengidentifikasi kerugian daerah melalui jumlah temuan dan nilai temuan yang dihasilkan dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pamungkas, Avrian, dan Ibtida (2019) mencatat bahwa meski persentase opini WTP meningkat, jumlah temuan ketidakpatuhan justru cenderung bertambah—indikasi bahwa kualitas pelaporan keuangan dan kualitas pengelolaan anggaran bergerak dalam jalur yang tidak selalu selaras.

Dari sisi keterkaitan dengan kesejahteraan, Nor, Hudaya, dan Novriyandana (2018) menemukan adanya kecenderungan negatif antara nilai temuan kerugian daerah dan IPM, yang mengimplikasikan bahwa semakin besar kerugian daerah, semakin berkurang alokasi efektif belanja publik untuk mendukung pembangunan manusia.

Furqan *et al.* (2020) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan layanan publik, sementara tindak lanjut rekomendasi audit berperan positif dalam meningkatkan *outcome* kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Setyaningrum, Wardhani, dan Martani (2019) menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh signifikan terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas administratif harus diikuti dengan implementasi substantif agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Secara logis, ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan menciptakan inefisiensi anggaran yang mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur—tiga pilar utama IPM.

### 2.3 Opini Audit BPK dan Indeks Pembangunan Manusia

Opini audit yang diberikan BPK mencerminkan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP seharusnya memberikan sinyal bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga alokasi anggaran lebih tepat sasaran dalam mendukung layanan publik dan pembangunan manusia (Pamungkas *et al.*, 2019).

Namun demikian, Furqan *et al.* (2020) menunjukkan bahwa opini audit saja tidak cukup tanpa disertai implementasi rekomendasi BPK secara nyata, karena temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan layanan publik.

Andani, Sarwani, & Respati (2019) mengonfirmasi bahwa opini audit memiliki kecenderungan positif terhadap kinerja pemerintah provinsi, tetapi keterkaitan ini dimediasi oleh kapasitas birokrasi dan kualitas implementasi program.

Kondisi di mana hampir seluruh provinsi berpredikat WTP—namun IPM masih sangat bervariasi—menunjukkan bahwa opini audit formal belum menjadi indikator yang memadai bagi capaian kesejahteraan riil (Wardhani *et al.*, 2020; Lestari & Rohman, 2022).

### 2.4 PDRB Per Kapita, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia

PDRB per kapita merupakan indikator utama kapasitas ekonomi masyarakat di suatu wilayah. BPS (2019) menunjukkan bahwa kenaikan PDRB per kapita secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan IPM melalui dua jalur: pertama, pendapatan yang lebih tinggi memperluas kemampuan masyarakat secara mandiri untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan; kedua, kapasitas fiskal pemerintah meningkat sehingga mampu membiayai belanja sosial dan infrastruktur pembangunan manusia secara lebih luas.

Nor, Hudaya, dan Novriyandana (2018) menegaskan bahwa hubungan antara PDRB per kapita dan IPM bersifat positif, dengan daerah berpendapatan lebih tinggi cenderung memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih baik.

*Gini Ratio* mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Terdapat ambivalensi dalam literatur mengenai arah keterkaitan *Gini Ratio* dengan IPM. Hanifah &

Rachmawati (2020) menemukan indikasi positif, berargumen bahwa ketimpangan yang lebih tinggi mendorong intensifikasi program pembangunan manusia sebagai respons pemerintah. Sebaliknya, Furqan *et al.* (2020) berargumen bahwa ketimpangan yang tinggi justru menghambat akses masyarakat lapisan bawah terhadap layanan dasar.

Ambivalensi ini memperkuat perlunya pendekatan kualitatif untuk membaca pola *Gini Ratio* secara kontekstual per provinsi, bukan sekadar angka agregat. Penelitian terdahulu umumnya mendekati hubungan antara akuntabilitas keuangan daerah dan IPM melalui lensa kuantitatif dengan uji statistik, namun menghasilkan temuan yang tidak konsisten akibat keterbatasan variasi data—terutama pada variabel opini audit yang hampir seragam (WTP) pada periode 2018–2019. Pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen memberikan peluang untuk mengungkap anomali, kecenderungan, dan interpretasi kontekstual yang tidak dapat ditangkap oleh model statistik semata. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memetakan pola keterkaitan secara naratif dan komparatif antar-provinsi.

## 3. Metode

### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan, menafsirkan, dan mengidentifikasi pola dalam data sekunder secara mendalam tanpa bergantung pada uji kausalitas statistik (Creswell, 2014). Analisis dokumen memungkinkan peneliti menelusuri kecenderungan dan anomali dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah secara sistematis dan kritis (Bowen, 2009).

Furqan *et al.* (2020) menegaskan bahwa analisis dokumen audit BPK dapat mengungkap hubungan yang tidak terlihat melalui pendekatan kuantitatif, khususnya mengenai dampak temuan audit terhadap kualitas layanan publik.

Selain itu, Pamungkas, Avrian, & Ibtida (2019) menunjukkan bahwa analisis dokumen laporan keuangan daerah mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi jumlah temuan audit, sehingga memperkuat relevansi pendekatan kualitatif dalam membaca pola akuntabilitas.

Pendekatan ini dinilai paling tepat mengingat variabel opini audit hampir tidak bervariasi pada periode penelitian—seluruh 34 provinsi berpredikat WTP pada 2019—sehingga interpretasi pola secara kualitatif lebih mampu mengungkap nuansa

kontekstual yang tidak dapat ditangkap oleh model statistik. Selain itu, penggunaan data dari sumber resmi nasional seperti IHPS BPK dan BPS memberikan tingkat reliabilitas dan konsistensi yang tinggi, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan valid tanpa memerlukan triangulasi melalui wawancara.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian bersumber dari dua sumber dokumen resmi: pertama, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI tahun 2018 dan 2019, untuk variabel kerugian daerah (jumlah dan nilai temuan) serta opini audit; dan kedua, publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk variabel IPM, PDRB per kapita, dan *Gini Ratio*. Cakupan data mencakup 34 provinsi di Indonesia selama dua tahun (2018–2019), yang dipilih secara *purposive* sebagai periode pra-Pandemi COVID-19 untuk menghindari distorsi struktural yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan global sejak 2020. Kedua sumber data tersebut dipilih karena merepresentasikan indikator resmi yang digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan dan pembangunan nasional, sehingga relevan dan sah untuk dianalisis secara komparatif antarwilayah.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahap yang saling berkesinambungan, mengacu pada kerangka analisis Miles, Huberman & Saldana (2014). Pertama, reduksi data untuk menyeleksi dan merangkum informasi yang relevan dari dokumen IHPS BPK dan BPS untuk setiap provinsi, memfokuskan perhatian pada variabel-variabel yang mencerminkan dimensi akuntabilitas keuangan dan capaian pembangunan manusia. Kedua, mengelompokkan provinsi ke dalam kategori berdasarkan tinggi atau rendahnya masing-masing variabel, dengan penentuan batas kategorisasi yang dilakukan secara kontekstual menggunakan nilai rata-rata nasional sebagai acuan, dengan mempertimbangkan distribusi data dan standar klasifikasi pembangunan manusia yang digunakan oleh BPS—bukan ambang angka mutlak yang bersifat arbitrer.

Ketiga, membandingkan pola antar-kelompok provinsi untuk mengidentifikasi kecenderungan yang konsisten, anomali yang menyimpang, dan variasi yang bergantung pada konteks spesifik tiap daerah. Pamungkas, Avrian, & Ibtida (2019) menegaskan bahwa analisis dokumen laporan keuangan daerah mampu mengungkap faktor-faktor

yang memengaruhi jumlah temuan audit, sehingga memperkuat relevansi pendekatan ini.

Keempat, interpretasi pola: memberikan narasi interpretatif atas pola yang ditemukan, dihubungkan dengan *agency theory* dan literatur relevan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna secara akademis maupun kebijakan. Furqan *et al.* (2020) menunjukkan bahwa analisis dokumen audit dapat mengungkap hubungan yang tidak terlihat melalui pendekatan kuantitatif, khususnya mengenai dampak temuan audit terhadap kualitas layanan publik. Proses ini dilakukan secara *iteratif* untuk memastikan bahwa pola yang diidentifikasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan dinamika kontekstual antar-provinsi yang sesungguhnya.

## 4. Hasil

### 4.1 Gambaran Umum Profil Data 34 Provinsi

Berdasarkan dokumen IHPS BPK dan publikasi BPS periode 2018–2019, rata-rata jumlah temuan kerugian daerah per provinsi adalah sekitar 70 temuan per tahun, dengan rentang yang sangat lebar, yaitu dari 10 temuan (Bali, 2018 dan 2019) hingga 241 temuan (Sumatera Utara, 2018). Variasi ini mengindikasikan perbedaan kapasitas pengawasan internal yang cukup signifikan antar-provinsi. Dari sisi nilai kerugian, Papua Barat mencatat nilai tertinggi sebesar Rp161,2 miliar pada 2018, sementara Kalimantan Utara mencatat nilai terendah sebesar Rp1,66 miliar pada 2019.

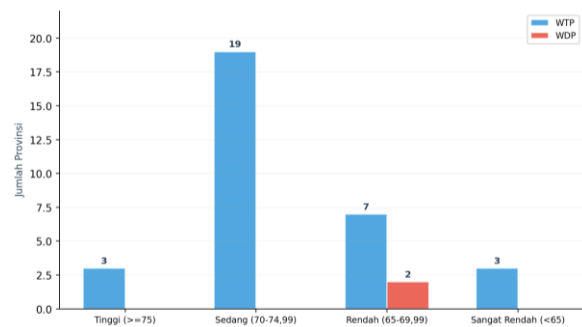
Opini audit BPK pada periode ini hampir seragam, di mana 32 dari 34 provinsi telah berpredikat WTP pada tahun 2018 dan seluruh 34 provinsi berpredikat WTP pada tahun 2019. Hanya Nusa Tenggara Barat dan Maluku yang masih berada pada opini WDP di tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi opini audit pada periode ini sangat terbatas, sehingga opini WTP tidak dapat menjadi pembeda yang bermakna antar-provinsi dalam analisis pola keterkaitan dengan IPM.

IPM antarprovinsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berkisar dari 60,06 (Papua, 2018) hingga 80,76 (DKI Jakarta, 2019), yang mencerminkan ketimpangan pembangunan manusia yang masih lebar antara kawasan barat dan timur Indonesia. PDRB per kapita juga menunjukkan rentang yang sangat lebar, dari Rp18,4 juta (Nusa Tenggara Timur, 2018) hingga Rp269,1 juta (DKI Jakarta, 2019). *Gini Ratio* berkisar antara 0,532 (Kepulauan Bangka Belitung, 2019) hingga 0,863 (DI Yogyakarta, 2018), menunjukkan variasi

ketimpangan yang cukup beragam di tingkat nasional.

#### 4.2 Pola WTP dan Variasi IPM Antarprovinsi

Data menunjukkan bahwa seluruh 34 provinsi memperoleh opini WTP pada tahun 2019, sementara capaian IPM antarprovinsi tetap bervariasi dalam rentang yang sangat lebar, dari 60,84 di Papua hingga 80,76 di DKI Jakarta. Pada tahun 2018, dari 32 provinsi yang berpredikat WTP, IPM-nya mencakup spektrum yang sama beragam: DKI Jakarta (80,47), DI Yogyakarta (79,53), dan Bali (74,77) berada di kutub tertinggi. Sementara itu, Papua (60,06), Papua Barat (63,74), dan Nusa Tenggara Timur (64,39) berada di kutub terendah, padahal semuanya berpredikat WTP. Gambar 2 menyajikan distribusi opini audit BPK berdasarkan kategori IPM. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa opini WTP tersebar merata di seluruh kelompok IPM, baik tinggi maupun rendah, tanpa menunjukkan pola pemisahan yang bermakna.



**Gambar 2.** Distribusi Opini Audit BPK Berdasarkan Kategori IPM

Sumber: Data diolah dari IHPS BPK RI (2018)

Distribusi tersebut menegaskan bahwa opini WTP tidak memiliki daya jelaskan terhadap variasi capaian IPM antarprovinsi. Dengan kata lain, pencapaian opini audit yang seragam tidak otomatis mencerminkan kesetaraan dalam pembangunan manusia, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor substantif di balik perbedaan tersebut.

#### 4.3 Pola Kerugian Daerah dan IPM Antarprovinsi

Komparasi antar provinsi mengungkapkan pola yang tidak searah antara tingkat kerugian daerah dan capaian IPM. Sumatera Utara mencatat jumlah temuan tertinggi, yaitu 241 pada tahun 2018 dan 217 pada tahun 2019, namun IPM tetap berada pada kisaran 71,18–71,74 yang mendekati rata-rata nasional. Jawa Barat dengan 168 temuan pada tahun 2018 dan

144 temuan pada tahun 2019 memiliki IPM sekitar 71,30–72,03. Sebaliknya, Papua Barat mencatat nilai kerugian sangat besar, yakni Rp161,2 miliar pada tahun 2018, dan IPM yang sangat rendah pada kisaran 63,74–64,70.

Tabel 2 menyajikan kategorisasi pola keterkaitan antara kerugian daerah dan IPM berdasarkan komparasi antar-provinsi.

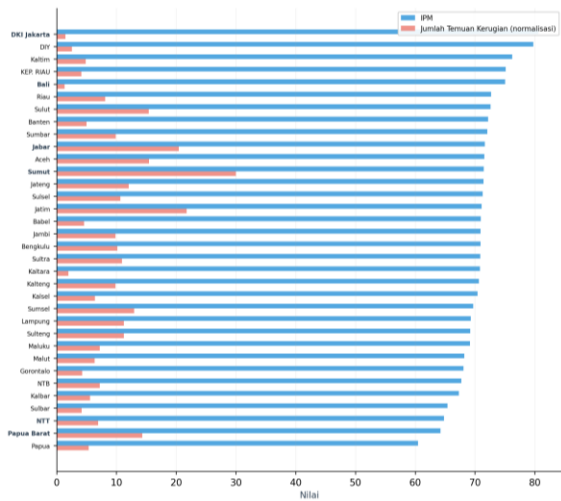
**Tabel 2.** Pola Keterkaitan Kerugian Daerah dan IPM per Kategori Provinsi

Kategori Pola	Contoh Provinsi	Karakteristik Utama
Kerugian tinggi – IPM sedang	Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur	Jumlah temuan di atas rata-rata (>100), namun IPM berkisar 70–72; kapasitas fiskal besar meredam dampak kerugian
Kerugian rendah – IPM tinggi	Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta	Jumlah temuan minimal (<20), IPM tertinggi nasional (>74); kecenderungan paling selaras antara akuntabilitas dan kesejahteraan
Kerugian tinggi – IPM rendah	Papua Barat, NTT	Nilai kerugian sangat besar, IPM terendah (<65); indikasi bahwa ketidakpatuhan menghambat efisiensi belanja publik
Kerugian sedang – IPM rendah	Sulawesi Barat, Gorontalo	Kerugian dalam kisaran menengah, namun IPM tetap rendah; faktor PDRB rendah lebih dominan
WTP dengan anomali kesejahteraan	NTB (2018), NTT	Opini WTP namun IPM tetap terendah; konfirmasi bahwa opini formal belum mencerminkan kualitas belanja publik

Sumber: Data diolah dari IHPS BPK RI dan BPS RI (2018-2019)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah maupun nilai kerugian daerah tidak selalu berbanding lurus dengan capaian IPM. Beberapa provinsi dengan temuan audit tinggi tetap memiliki IPM mendekati rata-rata nasional, sementara provinsi lain dengan kerugian besar justru menunjukkan capaian pembangunan manusia yang rendah. Pola ini menegaskan adanya *disconnect* antara akuntabilitas administratif dan *outcome* kesejahteraan masyarakat.

Untuk memahami keterkaitan antara kerugian daerah dan capaian pembangunan manusia, diperlukan pembacaan pola yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mempertimbangkan variasi kapasitas fiskal antarprovinsi. Gambar 3 menyajikan perbandingan antara IPM dan jumlah temuan kerugian daerah berdasarkan rata-rata periode 2018–2019, yang memperlihatkan sebaran provinsi tanpa pola *linear* yang konsisten.



**Gambar 3.** Perbandingan IPM dan Jumlah Temuan Kerugian Daerah (Rata-rata 2018-2019)  
*Sumber: Data diolah dari IHPS BPK RI dan BPS RI (2018-2019)*

hasil komparasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kerugian daerah dan capaian pembangunan manusia tidak bersifat linear. Sebaran provinsi dalam Gambar 3 memperlihatkan bahwa tingginya jumlah temuan audit tidak selalu berimplikasi pada rendahnya IPM, begitu pula sebaliknya. Pola ini menegaskan perlunya analisis kontekstual yang mempertimbangkan kapasitas fiskal, kualitas birokrasi, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit untuk memahami keterkaitan akuntabilitas keuangan dengan pembangunan manusia secara lebih mendalam.

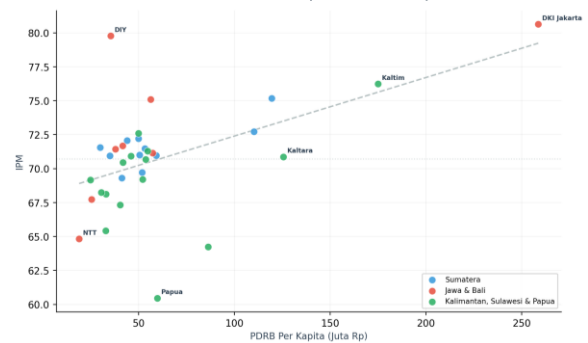
**4.4 Pola PDRB Per Kapita dan IPM Antarprovinsi**

Seluruh variabel yang dianalisis menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki kecenderungan

paling konsisten dengan capaian IPM. Provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi, yaitu DKI Jakarta (Rp248,3 hingga Rp269,1 juta), Kalimantan Timur (Rp174,4 hingga Rp175,7 juta), dan Kepulauan Riau (Rp116,6 hingga Rp122,4 juta), umumnya mencatat IPM di atas 74. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur (Rp18,4 hingga Rp19,6 juta) konsisten berada di posisi IPM terendah nasional.

Pengecualian tetap perlu dicatat. Kalimantan Utara memiliki PDRB per kapita sangat tinggi, yaitu Rp120 hingga Rp131 juta, tetapi IPM hanya berada pada kisaran 70,56 hingga 71,15. Papua memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Jawa, namun IPM tetap terendah secara nasional. Kedua kasus ini merupakan daerah yang dominan berbasis sumber daya alam.

Gambar 4 memvisualisasikan keterkaitan antara PDRB per kapita dan IPM rata-rata periode 2018–2019, di mana pola konsistensi sekaligus anomali daerah berbasis sumber daya alam dapat terlihat secara bersamaan.



**Gambar 4.** Keterkaitan PDRB Per Kapita dan IPM (Rata-rata 2018-2019)

*Sumber: Data diolah dari BPS RI (2018-2019)*

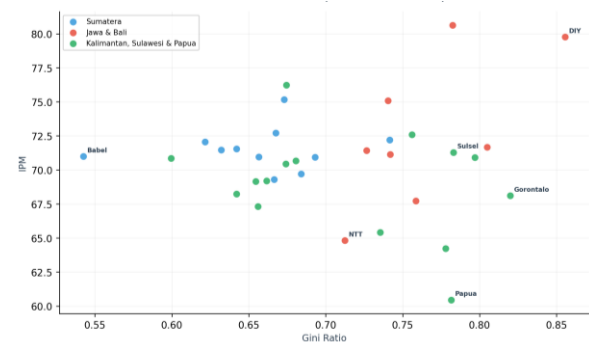
Hasil yang ditampilkan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki keterkaitan erat dengan capaian IPM, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Kasus Kalimantan Utara dan Papua menegaskan bahwa tingginya pendapatan berbasis sumber daya alam tidak otomatis meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kondisi tersebut menekankan pentingnya kapasitas birokrasi, efektivitas belanja publik, serta pemerataan akses layanan dasar sebagai faktor pelengkap dalam menjelaskan variasi capaian pembangunan antarprovinsi.

**4.5 Pola Gini Ratio dan IPM Antarprovinsi**

Gini Ratio tidak memperlihatkan pola yang konsisten dengan IPM di seluruh provinsi. DI Yogyakarta mencatat Gini Ratio tertinggi nasional sebesar 0,863 pada tahun 2018, namun IPM juga termasuk salah satu yang tertinggi dengan nilai 79,53.

Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung memiliki Gini Ratio terendah sebesar 0,532 pada tahun 2019 dengan IPM pada kisaran menengah, yaitu 71,30. Di sisi lain, Sulawesi Selatan dengan Gini Ratio 0,785 hingga 0,781 mencatat IPM 70,90 hingga 71,66, sedangkan Gorontalo dengan Gini Ratio 0,820 mencatat IPM 67,71 hingga 68,49. Pola ini berbeda dari DI Yogyakarta meskipun tingkat ketimpangannya serupa.

Gambar 5 menyajikan sebaran keterkaitan Gini Ratio dan IPM rata-rata periode 2018–2019 yang menunjukkan tidak adanya pola linear yang dapat diandalkan secara konsisten lintas provinsi.



**Gambar 5.** Keterkaitan Gini Ratio dan IPM (Rata-rata 2018-2019)

*Sumber: Data diolah dari BPS RI (2018-2019)*

Hasil yang ditampilkan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan, sebagaimana tercermin dalam Gini Ratio, tidak memiliki hubungan yang konsisten dengan capaian IPM. Beberapa provinsi dengan Gini Ratio tinggi justru mencatat IPM yang relatif baik, sementara provinsi lain dengan ketimpangan rendah tidak selalu memiliki capaian pembangunan manusia yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh distribusi pendapatan, melainkan juga oleh faktor lain seperti efektivitas kebijakan sosial, pemerataan layanan publik, dan kapasitas fiskal daerah.

## 5. Diskusi

### 5.1 WTP sebagai Indikator Administratif: Keterbatasan dalam Mengukur Kesejahteraan

Temuan pada bagian 4.2 menunjukkan bahwa opini WTP yang hampir seragam tidak mampu membedakan capaian kesejahteraan antarprovinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa opini audit formal lebih merepresentasikan kepatuhan administratif dalam pelaporan keuangan, yaitu kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rekonsiliasi laporan,

dibandingkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat ketidakselarasan sistemik antara akuntabilitas administratif dan hasil pembangunan manusia.

Furqan et al. (2020) memperkuat interpretasi ini dengan menunjukkan bahwa faktor penentu opini audit di Indonesia lebih bersifat teknis-administratif daripada mencerminkan substansi tata kelola anggaran yang berorientasi pada pembangunan. Rahayu dan Khoirunurrofik (2022) menambahkan temuan penting berupa hubungan non-linear antara opini audit BPK dan efisiensi belanja pemerintah daerah: pada tahap awal, peningkatan akuntabilitas memang berjalan seiring dengan efisiensi, namun ketika seluruh provinsi telah berpredikat WTP, opini tersebut kehilangan daya pembeda. Sianturi dan Dwicaksono (2023) dalam kajian Bappenas memberikan bukti empiris yang relevan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pembangunan daerah di Kawasan Barat Indonesia, namun tidak signifikan di Kawasan Timur. Hal ini mengonfirmasi bahwa akuntabilitas formal belum mampu menjadi jaminan kesejahteraan di seluruh wilayah. Implikasinya adalah bahwa standar opini audit perlu diperluas cakupannya untuk mencakup dimensi efektivitas belanja publik, tidak sekadar kepatuhan teknis pelaporan.

### 5.2 Kerugian Daerah sebagai Faktor Kondisional: Kapasitas Fiskal sebagai Penentu Dampak

Pola yang teridentifikasi pada bagian 4.3 menegaskan bahwa dampak kerugian daerah terhadap IPM tidak bersifat linear, melainkan sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Provinsi besar seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara memiliki penerimaan daerah yang jauh lebih besar, sehingga kerugian ratusan miliar rupiah masih relatif kecil dibandingkan total kapasitas fiskalnya dan tidak secara langsung mengurangi belanja layanan publik. Sebaliknya, di Papua Barat, kerugian dengan proporsi yang sama besar menyerap porsi jauh lebih signifikan dari anggaran daerah, sehingga dampaknya terhadap efisiensi belanja publik dan akhirnya terhadap IPM jauh lebih berat.

Mangkunegara (2015) berargumen bahwa dampak kerugian daerah pada IPM bersifat kondisional dan bergantung pada konteks fiskal daerah, sebuah argumen yang dikonfirmasi oleh pola dalam penelitian ini. Wahyuni, Fuad, dan Sari (2020) memperkuat interpretasi ini dengan menunjukkan bahwa kualitas belanja modal pemerintah daerah berperan sebagai mediator kritis, karena kerugian yang besar cenderung mengurangi belanja modal

yang seharusnya menghasilkan infrastruktur layanan dasar. Sukmadilaga, Pratama, dan Mulyani (2020) menambahkan bahwa daerah dengan tata kelola lebih baik mampu meminimalkan dampak kerugian terhadap kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, temuan ini mengandung implikasi kebijakan penting: pengawasan BPK perlu diprioritaskan secara asimetris, dengan intensitas lebih tinggi pada daerah kecil yang rentan secara fiskal, di mana setiap rupiah yang bocor memiliki konsekuensi langsung yang lebih berat terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **5.3 PDRB Per Kapita sebagai Faktor Dominan: Kapasitas Ekonomi dan Batasannya**

Konsistensi keterkaitan PDRB per kapita dengan IPM sebagaimana terlihat pada bagian 4.4 menegaskan bahwa kapasitas ekonomi regional merupakan prasyarat mendasar bagi pembangunan manusia, lebih dominan dibandingkan variabel akuntabilitas keuangan manapun dalam penelitian ini. Maulana dan Bowo (2013) serta Rakhmadani (2018) menjelaskan mekanismenya melalui dua jalur transmisi: pendapatan per kapita yang lebih tinggi memperluas kemampuan masyarakat mengakses layanan dasar secara mandiri, dan kapasitas fiskal yang lebih besar memungkinkan belanja sosial yang lebih ekspansif. Febriansyah dan Sitorus (2021) menambahkan bahwa kualitas tata kelola keuangan daerah berperan sebagai katalisator yang memperkuat jalur transmisi ini.

Namun anomali pada daerah berbasis sumber daya alam, seperti Kalimantan Utara dan Papua, mengungkap batasan penting dari argumen ini. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor ekstraktif tidak secara otomatis mendistribusikan manfaat secara merata ke masyarakat luas, sehingga PDRB yang tinggi tidak selalu diterjemahkan ke dalam IPM yang proporsional. Pola ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perlu, tetapi tidak cukup bagi peningkatan kesejahteraan. Tanpa kebijakan redistribusi yang efektif dan belanja sosial yang terarah, kekayaan alam hanya akan terkonsentrasi pada segelintir pihak tanpa mengangkat kualitas hidup masyarakat luas. Implikasi kebijakannya adalah bahwa strategi percepatan IPM di kawasan timur Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan dorongan PDRB melalui eksploitasi sumber daya alam, melainkan harus disertai transformasi struktur ekonomi yang inklusif dan mekanisme redistribusi yang efektif.

### **5.4 Gini Ratio dan Kompleksitas Ketimpangan: Konteks Kelembagaan sebagai Penentu**

Ketidastabilan pola Gini Ratio terhadap IPM pada bagian 4.5 mengisyaratkan bahwa ketimpangan

pendapatan tidak secara langsung menentukan kualitas hidup masyarakat. Yang lebih menentukan adalah bagaimana pemerintah merespons ketimpangan tersebut melalui kebijakan belanja dan redistribusi. Di Yogyakarta membuktikan bahwa ketimpangan yang tinggi sekalipun tidak harus berujung pada IPM yang rendah, jika diiringi oleh ekosistem pendidikan yang kuat dan sistem pelayanan kesehatan yang merata. Rustariyuni (2014) menyebut mekanisme ini sebagai efek kompensasi kebijakan, di mana ketimpangan tinggi mendorong pemerintah mengintensifkan program sosial sebagai respons terhadap tekanan sosial-politik.

Sebaliknya, kasus Gorontalo dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi tanpa kebijakan redistributif yang efektif dan tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai justru berdampak buruk bagi kelompok termiskin. Prasetyoningrum (2018) serta Ahyaruddin dan Amrillah (2018) menegaskan bahwa ketimpangan hanya akan memberikan pengaruh positif terhadap IPM jika pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengelola ketimpangan melalui belanja publik yang tepat sasaran. Temuan ini mengandung pesan kebijakan penting: evaluasi kinerja pemerintah daerah berbasis angka ketimpangan semata adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Yang lebih relevan adalah menilai bagaimana pemerintah merespons ketimpangan yang ada, apakah melalui belanja yang efektif dan merata, atau sebaliknya.

### **5.5 Ketidakselarasan Akuntabilitas sebagai Tantangan Struktural Tata Kelola Daerah**

Empat pola yang teridentifikasi dalam penelitian ini, jika dibaca secara bersamaan, mengungkap satu narasi yang melampaui masing-masing temuan individual: terdapat ketidakselarasan sistemik antara akuntabilitas keuangan formal dan hasil pembangunan manusia di Indonesia. Pemerintah daerah telah berhasil menguasai aspek-aspek yang diukur BPK, seperti kerapian laporan, kelengkapan rekonsiliasi, dan kepatuhan SAP, namun belum tentu berhasil dalam aspek yang paling dibutuhkan masyarakat, yaitu efisiensi penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup.

Widodo dan Hakim (2022) menyebutnya sebagai paradoks akuntabilitas era reformasi: semakin canggih sistem pelaporan keuangan daerah, semakin jauh jarak antara laporan dan realitas. Sukmadilaga, Pratama, dan Mulyani (2020) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa transparansi formal tidak otomatis meningkatkan akuntabilitas substantif tanpa disertai partisipasi masyarakat yang kuat dan

mekanisme pengawasan yang mendorong perbaikan implementasi, bukan hanya perbaikan pelaporan. Temuan keseluruhan ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak dapat hanya bertumpu pada indikator akuntabilitas keuangan formal. Kinerja yang sesungguhnya harus diukur dari seberapa efektif pengelolaan keuangan tersebut menciptakan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti akses kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, dan daya beli yang meningkat. Selama dua dimensi ini belum terhubung secara sistemik dalam sistem evaluasi kinerja daerah, reformasi akuntabilitas keuangan akan terus menghasilkan angka yang memuaskan di atas kertas, namun tidak mampu menggerakkan IPM ke arah yang diharapkan.

## 6. Kesimpulan

Penelitian ini memetakan keterkaitan akuntabilitas keuangan daerah, yang direpresentasikan oleh kerugian daerah dan opini audit BPK, dengan capaian IPM di 34 provinsi Indonesia periode 2018–2019. Hasil analisis menunjukkan adanya ketidakselarasan sistemik antara akuntabilitas formal dan kesejahteraan masyarakat. Opini WTP yang seragam tidak mampu membedakan tingkat kesejahteraan, karena lebih menekankan kepatuhan teknis pelaporan daripada efektivitas belanja publik. Kerugian daerah berdampak secara kondisional, bergantung pada kapasitas fiskal, sehingga daerah kecil lebih rentan terhadap kebocoran anggaran. PDRB per kapita terbukti paling konsisten terkait dengan IPM, meski daerah berbasis sumber daya alam menunjukkan anomali dengan PDRB tinggi tetapi IPM rendah akibat struktur ekonomi ekstraktif. Sementara itu, Gini Ratio tidak menunjukkan pola stabil karena pengaruh ketimpangan terhadap IPM sangat bergantung pada respons kebijakan dan kapasitas kelembagaan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini bersifat struktural. Evaluasi kinerja pemerintah daerah perlu diperluas untuk mencakup efektivitas belanja publik, bukan sekadar kepatuhan teknis. Opini WTP harus dipandang sebagai prasyarat minimal, sementara fokus utama adalah memastikan anggaran benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat nasional, strategi percepatan IPM di kawasan timur Indonesia harus diarahkan pada transformasi ekonomi yang inklusif, mengingat PDRB meski konsisten sebagai prediktor kesejahteraan, manfaatnya tidak otomatis merata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan waktu dua tahun yang membatasi analisis longitudinal. Studi mendatang disarankan memperpanjang periode observasi, memperluas unit analisis ke kabupaten/kota, serta menambahkan variabel mediasi seperti belanja modal, kesehatan, pendidikan, dan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk menangkap jalur akuntabilitas menuju kesejahteraan secara lebih presisi.

## 7. Referensi

- Adiputra, I. M. P., Utama, I. M. K., & Handajani, L. (2018). Opini audit BPK dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 452–470. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.08.9027>
- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471–486.
- Akib, M., Hafiz, M., & Wahyuni, E. (2016). Pengaruh opini audit terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(1), 45–60.
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). The influence of local government characteristics and audit opinions on the performance of provincial governments in Indonesia. *Journal of Accounting*, 7(2), 113–128.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/01/09/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/01/14/>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2018–2019*. Jakarta: BPK RI. <https://www.bpk.go.id/ihaps>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2020*. Jakarta: BPK RI. <https://www.bpk.go.id/ihaps>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Febriansyah, E., & Sitorus, E. (2021). Kualitas tata kelola keuangan daerah dan kesejahteraan

- masyarakat: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.01>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business & Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1673102>
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 88–103.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lestari, D., & Rohman, A. (2022). Pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap opini audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–12. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mangkunegara, M. (2015). Pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan IPM. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 3(1), 22–38.
- Martani, D., & Adzan, N. A. (2014). Pengaruh civil society terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 1–18.
- Maulana, A., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(2), 102–114.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Pamungkas, B., Ibtida, R., Avriani, C., & Ntim, C. G. (2018). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business & Management*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540132>
- Prasetyaningsih, E. (2014). Pengaruh temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–15.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium*, 6(2), 217–240. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2004). Public spending and outcomes: Does governance matter? *World Bank Policy Research Working Paper No. 3274*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3274>
- Rakhmadani, F. (2018). Pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 65–78.
- Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Ratio, pengeluaran non makanan per kapita, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi pada IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Piramida*, 10(1), 45–55.
- Sarjono, A. (2016). Pengaruh opini audit terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) pemerintah daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2021). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 1–22. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.10>
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2020). Transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah daerah: Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 499–516. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24512>
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.
- Wahyuni, S., Fuad, & Sari, S. P. (2020). Belanja modal, kualitas audit, dan pembangunan manusia: Analisis pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*

*Multiparadigma*, 11(3), 531–550.

<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.31>

Widodo, N. T., & Hakim, L. (2022). Disconnect akuntabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat: Kajian pada pemerintah daerah era pasca-reformasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).